Peran Ekonomi, Politik, Sosial dan Kekerasan atas Nama Agama dalam Wawasan Nusantara

Nurul Diah Rahmatanti

Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia

rahmathanty20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Wawasan Nusantara yang meliputi peranannya dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data skunder, yaitu data diambil dari buku, majalah, hasil penelitian, undang-undang dan informasi dari internet. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan interpretasi kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pengimplementasian Wawasan Nusantara. Dalam bidang politik, masyarakat yang tinggal di suatu daerah terpencil tidak ketinggalan dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, mencegah dan mengatasi faktor-faktor penyebab timbulnya disintegritas bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan, serta menjaga keamanan dari serangan pihak luar. Di bidang sosial dan budaya dapat menunjang program transmigrasi untuk meratakan penduduk di wilayah Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sarana memperluas pengetahuan masyarakat, ikut mencerdaskan bangsa, dan menunjang program kesehatan masyarakat. Dalam bidang budaya dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempelajari kebudayaan antar daerah. Pada bidang ekonomi pengangkutan udara sebagai sarana untuk memperlancar roda perekonomian dan menjaga stabilitas ekonomi, mendukung sektor pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memantapkan dan meningkatkan ketahanan nasional dengan meratakan dan memperkuat pertahanan di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: agama, politik, sosial, ekonomi, kekerasan, wawasan nusantara

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau dan beribu-ribu pulau kecil yang terletak antara dua lautan besar yaitu lautan India dan lautan Pasific. Banyaknya pulau-pulau itu bukan berarti berdiri sendiri-sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal inilah yang mendorong adanya gagasan Wawasan Nusantara. Konsepsi Wawasan Nusantara mempunyai arti yang sangat penting bagi persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mengandung suatu prinsip adanya satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Empat prinsip Wawasan Nusantara tersebut hanya dapat terwujud bila dapat diciptakan suatu perhubungan yang lancar dan mantap. Berdasarkan hal tersebut maka untuk memperlancar hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, antara kota yang satu dengan kota yang lain, angkutan udara merupakan salah satu sarana yang paling penting untuk tercapainya maksud tersebut disamping sarana angkutan lainnya. Kelancaran pengangkutan udara akan membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pengangkutan udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam perwujudan Wawasan Nusantara, sebagai salah satu sarana bagi tercapainya kesatuan pandangan seluruh rakyat Indonesia.

Mengingat pentingnya pengangkutan udara dalam rangka menunjang pengimplementasian Wawasan Nusantara tersebut, maka pemerintah berusaha membantu berkembangnya perusahaan-perusahaan penerbangan yang menyelenggarakan pengangkutan nasional (penerbangan domestik) salah satunya adalah pengangkutan udara perintis. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, ternyata sekarang dapat dilihat hasilnya walaupun masih ada kekurangan-kekurangannya.

Dalam mewujudkan tujuan nasional banyak mengalami kendala, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Pada tataran konsep tidak adanya kata sepakat antara perkataan dan perbuatan di antara para elit politik. Contoh kongkrit konsep ekonomi liberal, ekonomi kerakyatan dan perwujudan Welfare State (negara kesejahteraan). Konsep ekonomi liberal mengutamakan kepentingan pasar bebas dan merupakan salah satu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilesme, liberalisme, dan keynesianisme dan neoliberalisme yang merupakan upaya untuk mengoreksi kelemahan dalam liberalisme.

Dalam paham ekonomi pasar liberal, diyakini bahwa pasar memiliki kemampuan dapat mengurus sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus pasar tidak diperlukan sama sekali. Tujuan konsep ini adalah kebebasan individu untuk bersaing secara sempurna di pasar, kepemilikan pribadi terhadap faktor produksi, pembentukan harga pasar dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Namun konsep ini tersisih oleh negara kesejahteraan peranan negara dalam ekonomi tidak dibatasi sebagai pembuat peraturan tetapi diperluas untuk membuat kewenangan dan melakukan 2 intervensi terhadap fiskal maupun moneter. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, negara kesejahteraan dengan tegas mengatakan "selama masih ada pengangguran campur tangan negara dalam perekonomian dibenarkan".

Paham yang berkembang di Indonesia masih ada ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di antara menghidupkan usaha kecil dan menengah, melindungi dan menghidupkan pasar tradisional, dan mengusahakan dunia usaha dalam konteks sektor riil, memberdayakan masyarakat kecil. Kebijakan pemerintah tidak liberalis-kapitalistik, mengurangi kemiskinan, perlindungan terhadap sumber daya alam. Pembuatan undang-undang Penanaman Modal, UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), Badan Layanan Umum (BLU) yang berpihak untuk kepentingan rakyat. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penanaman modal asing harus berpihak untuk kepentingan rakyat kecil.

Ketiga konsep tersebut di atas mewarnai kebijakan pemerintah sekarang, Wawasan nusantara diharapkan mampu menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda dalam masyarakat dan memberikan solusi untuk mendasari Ketahanan Nasional suatu bangsa, sehingga tujuan nasional dapat teralisasi.

2. KASUS MASALAH

Jelaskan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan? Benarkah agama adalah penyebab tindakan kekerasan atau perang atas nama agama? Apakah motif-motif ekonomi, sosial, politik, budaya dan hankam yang sesungguhnya berada di balik berbagai tindakan kekerasan yang mengatas-namakan agama?

3. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian wawasan nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan bagi seluruh bangsa serta turut mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan kesatuan di dalam semua aspek kehidupan nasional, baik yang alamiah maupun sosial (Mursito, Amirul Hadi, 1992). **Wawasan Nusantara mencakup :**

- i.** Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

- e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
- ii. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:**
- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
 - c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- iii. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:**
- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
- iv. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti:**
- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Wawasan nusantara sebagai “cara pandang” bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala masalah dan hekat ancaman yang timbul baik dari luar maupun dari dalam segala aspek kehidupan bangsa. Sebagai landasan kerja bagi penyelenggaraan dan pembinaan hidup kebangsaan serta hidup kenegaraan perlu didasari oleh GBHN sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945) dan APBN sebagai produk legeslatif dan eksekutif (pasal 23 ayat 1 UUD 1945).

Agama dan kekerasan telah menjadi pembicaraan sekaligus perdebatan. Konflik antar kelompok penganut agama dan penindasan atas nama agama mewarnai berita-berita di seluruh dunia, sehingga mantan legislator dari Partai Republik AS, Frank R. Wolf bersaksi bahwa sepanjang karirnya, ia telah menyaksikan kondisi tragis tentang penganiayaan agama yang setiap hari tampak nyata dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Frank R. Wolf bersaksi tentang kunjungannya ke Irak pada bulan Januari tahun 2014 bersama dengan delegasi dari 21st Century Wilberforce Initiative. Ia menjelaskan bahwa menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mengerikannya situasi di sana. Musim panas tahun 2014 ditandai dengan kebangkitan ISIS yang begitu cepat dan tak teduga. Orang-orang Kristen diminta untuk pergi dan jika mereka tidak mau pergi, mereka harus menjadi mualaf, membayar, atau mati. Para laki-laki Yazidi dibunuh dan para wanita serta anak-anak Yazidi diperjual-belikan, diperkosa dan disiksa.

Kemudian tentang perjalanannya ke Nigeria, juga bersama dengan 21st Century Wilberforce Initiative, Frank R. Wolf bersaksi bahwa mereka mewawancari banyak orang Kristen dari wilayah tengah dan utara. Mereka mendapat berita dari orang-orang dari desa-desa mereka bahwa orang-orang Kristen banyak yang dilecehkan, diculik, dan dibunuh dalam serangan dari Boko Haram dan militan Fulani. Menurut The Washington Post, banyak gadis dan wanita yang telah diperkosa, tetapi kemudian dilepaskan oleh Boko Haram agar menyandang stigmatisasi ekstrim dari masyarakat mereka. Lagi Frank R. Wolf menceritakan ketika ia masuk ke wilayah Tibet pada pertengahan tahun 1990an dan ia bersaksi tentang apa yang ia lihat dan yang sedang terjadi di sana sangatlah mengerikan. Biarabiar umat Budha diatur oleh polisi. Tindakan sederhana seperti misalnya menyimpang foto Dalai Lama dilarang dan dihukum berat. Sedikitnya 140 biksu Budha dari Tibet menuangkan bensin ke tubuh mereka sendiri dan hendak membakar diri mereka sendiri sebagai protes terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah China. Masyarakat Muslim Ugyhur dan Falan Gong juga ditekan oleh pemerintah.

Di Pakistan, Asia Bibi, seorang wanita Katolik Pakistan dipenjara pada tahun 2009 karena membuat pengakuan terbuka atas imannya. Ia dipenjara sepanjang tahun sebelum akhirnya secara resmi dituntut dan diadili. Pada tahun 2010, ia dihukum mati dengan digantung. Shabaz Bhatti, satu-satunya anggota kabinet Pakistan yang beragama Kristen pada saat itu berbicara menentang undang-undang penistaan dan memberi dukungan kepada Bibi. Ia ditembak mati pada tahun 2011 ketika keluar dari rumah ibunya. Frank R. Wolf melanjutkan kesaksiannya, bahwa di Etiopia banyak orang Kristen dianiaya. Demikian juga orang-orang Kristen di Sudan, khususnya di pegunungan Nuba orang-orang Kristen menghadapi penganiayaan yang mengerikan dari kelompok pimpinan Omar al-Bashir. Bahkan di Eropa dan juga Amerika antiSemitisme terus meningkat.

4. PEMBAHASAN

Pandangan bahwa Agama adalah Sumber Kekerasan

Pandangan bahwa Agama adalah Sumber Kekerasan William T. Cavanaugh menjelaskan akar dan proses penyebaran mitos tentang kekerasan agama tersebut hingga akhirnya mitos tersebut dianggap banyak orang sebagai fakta. Cavanaugh menjelaskan bahwa elemen-elemen mitos tentang perang agama mulai dapat ditemukan dalam teori politik abad tujuh belas. Mulai dari Benedict de Spinoza yang menulis beberapa karya politik yang sebagian besar dimotivasi oleh perang yang terus berkecamuk antara Belanda dan negaranegara Eropa lainnya sepanjang hidup Spinoza. Pada pengantar karyanya yang berjudul *Tractatus Theologico-Politicus*, Spinoza menulis bahwa penyebab dari banyak perang dan revolusi adalah dogmadogma agama yang saling bertentangan. Kemudian Thomas Hobbes juga mendakwa bahwa Perang Saudara Inggris tahun 1640-an dan 1650an sebagai konflik yang didorong oleh motif-motif keagamaan, walaupun pada tahun 1656, James Harrington telah menerbitkan tulisannya yang berjudul *Commonwealth of Oceana*, yang telah melacak dan menemukan bahwa penyebab perang tersebut adalah karena faktor ekonomi dan hukum. Lagi mitos tentang perang agama juga dapat ditemukan dalam karya John Locke, *Letter Concerning Toleration* (1689). Walaupun di sini Locke tidak menyalahkan agama itu sendiri sebagai penyebab perang, namun menurut Locke, penolakan toleransi terhadap pemikiran yang berbeda yang menyebabkan berbagai perang tersebut. Selain Spinoza, Hobbes dan Locke sejumlah teori politik masa kini seperti pemikiran Quentin Skinner, Jeffrey Stout, Judith Shklar dan John Rawls juga mengokohkan pandangan mitos kekerasan agama. Alfred North Whitehead adalah seorang filsuf yang menulis dalam bukunya *Religion in the Making* bahwa agama tidak selalu berarti baik dan bahkan mungkin sangat jahat dan oleh sebab itu dalam mempertimbangkan agama kita tidak boleh terobsesi dengan gagasan tentang kebaikan yang ditawarkannya karena itu adalah khayalan yang berbahaya. Kemudian Whitehead mengatakan bahwa mengingat berbagai kengerian yang dihasilkan oleh kefanatikan agama, maka wajar bagi para pemikir yang peka untuk meminimalkan dogma-dogma agama. Ateis Amerika, Ingersoll berkata bahwa agama lebih banyak menciptakan musuh ketimbang teman dan satu kata ini, 'agama' menyangkut semua horizon ingatan akan perang, kebiadaban, penganiayaan, tirani dan kematian. Blaise Pascal mengatakan bahwa manusia tidak pernah melakukan kejahatan sesempurna dan segembira ketika mereka melakukannya karena keyakinan agama. Kemudian Aldous Huxley juga mengatakan bahwa sedikitnya dua per tiga kesengsaraan kita berasal dari kebodohan manusia, kedengkian dan motivator terbesar dan pembenaran tindakankedengkian dan kebodohan, idealism, dogmatisme dan semangat penyebaran agama [dilakukan] atas nama agama dan berhala politik. Para pemikir yang disebut Adam C. Scarfe sebagai para Atheis Baru, seperti misalnya Daniel Dennett, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dan Sam Harris melontarkan kritik bahwa agama memiliki peran dalam menumbuhkan kekerasan dan premis utama dalam argumen mereka melawan agama adalah bahwa agama secara instrinsik merupakan sumber kekerasan. Daniel Dennett mengatakan bahwa saat ini para agamawan secara aktif berusaha untuk memberikan keadilan sorga bagi mereka yang dianggap sebagai orang-orang berdosa. Richard Dawkins juga mengatakan bahwa membayangkan jika dunia tanpa agama, maka tidak akan ada para pelaku bom bunuh diri, tidak ada peristiwa 11 September [serangan World Trade Center), tidak ada Perang Salib, tidak ada perang Israel dan Palestina, tidak ada penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi karena telah menjadi para 'pembunuh Kristus'. Menurut Dawkins agama

dan pertikaian antar agama merupakan akar dari hampir semua tindakan kekerasan dan konflik di seluruh dunia. Christopher Hitchens menyatakan kecemasannya bahwa orang-orang beragama merencanakan pembinasaaan terhadap para ateis seperti dirinya. Sam Harris mengatakan bahwa kekerasan agama ada di antara kita karena agama kita secara intrinsik memang saling bermusuhan antara satu sama lainnya. Jika diberi pilihan antara melenyapkan perkosaan atau agama, Sam Harris dengan tanpa ragu akan lebih memilih untuk melenyapkan agama karena menurutnya agama merupakan sumber kekerasan baik dulu maupun sekarang.

5. KESIMPULAN

Kajian ini melihat bahwa ada sejumlah motif non-agamawi yang memanfaatkan agama ketimbang agama itu sendiri, yang sesungguhnya harus bertanggung jawab atas setiap kekerasan atas nama agama. Motif kelompok berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan seringkali memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Motif kelompok tertindas untuk memperoleh kebebasan/ kemerdekaan dengan jalan kekerasan seringkali juga memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Kemudian motif politisi mendulang keuntungan politis dengan melakukan pembiaran terjadinya kekerasan seringkali juga memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Akhirnya motif pemimpin (aktor) agama demi mendulang keuntungan politis dengan memberikan legitimasi kekerasan seringkali juga memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Dengan demikian pandangan bahwa agama adalah sumber kekerasan merupakan mitos ketimbang fakta.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau dan beribu-ribu pulau kecil yang terletak antara dua lautan besar yaitu lautan India dan lautan Pasific. Banyaknya pulau-pulau itu bukan berarti berdiri sendiri-sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal inilah yang mendorong adanya gagasan Wawasan Nusantara. Konsepsi Wawasan Nusantara mempunyai arti yang sangat penting bagi persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mengandung suatu prinsip adanya satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Empat prinsip Wawasan Nusantara tersebut hanya dapat terwujud bila dapat diciptakan suatu perhubungan yang lancar dan mantap. Berdasarkan hal tersebut maka untuk memperlancar hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, antara kota yang satu dengan kota yang lain, angkutan udara merupakan salah satu sarana yang paling penting untuk tercapainya maksud tersebut disamping sarana angkutan lainnya. Kelancaran pengangkutan udara akan membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Pengangkutan udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam perwujudan Wawasan Nusantara, sebagai salah satu sarana bagi tercapainya kesatuan pandangan seluruh rakyat Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sutarwati, S. (2013). PERANAN PENGANGKUTAN UDARADI INDONESIA DALAM MENUNJANG PENGIMPLEMENTASIAN WAWASAN NUSANTARA. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 6(2), 51-58.

Purwanto, E. (2019). Peran Ekonomi, Politik, Dan Sosial Dalam Kekerasan Atas Nama Agama. *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 111-126.

Kusrahmadi, S. D. (2017). Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional.

Mursito dan Hadi Amirul. (1992). Kewiraan. Rineka Cipta : Jakarta

Cavanaugh, William T. (2007). "Does Religion Cause Violence?" *Harvard Divinity Bulletin*

Dennett, Daniel. (2006). *Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon* : New York